



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tanggal 4 Juni 2013 Nomor 170/494/DPRD perihal Persetujuan Pergeseran;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013 ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Badan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubabahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694) ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2013; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

27. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2013; (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 12), digeser sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 digeser, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	661.132.514.505,00
Setelah pergeseran sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>660.739.514.505,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(393.000.000,00)

b. Belanja Langsung

Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	692.855.308.211,89
Setelah pergeseran sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>693.248.308.211,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	393.000.000,00

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai tetap sejumlah	Rp.	579.045.202.745,00
b. Belanja hibah tetap sejumlah	Rp.	26.665.000.000,00
c. Belanja bantuan sosial tetap sejumlah	Rp.	162.500.000,00
d. Belanja bagi hasil tetap sejumlah	Rp.	19.187.618.085,00
e. Belanja bantuan keuangan tetap sejumlah	Rp.	35.072.193.675,00
f. Belanja tidak terduga		
Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	1.000.000.000,00
Setelah pergeseran sejumlah	<u>Rp.</u>	<u>607.000.000,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(393.000.000,00)

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	54.688.927.423,00
Setelah pergeseran sejumlah	Rp.	<u>54.246.127.423,00</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(442.800.000,00)

b. Belanja Barang dan jasa

Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	388.529.058.597,03
Setelah pergeseran sejumlah	Rp.	<u>398.057.058.597,03</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	9.528.000.000,00

c. Belanja modal

Sebelum pergeseran sejumlah	Rp.	249.637.322.191,86
Setelah pergeseran sejumlah	Rp.	<u>240.945.122.191,86</u>
Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.692.200.000,00)

2. Ketentuan Pasal 5 digeser, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Pergeseran APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Pergeseran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Pergeseran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Pergeseran Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Pergeseran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Ketentuan Pasal 6 digeser, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Walikota sebagai Landasan Operasional.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku untuk Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juni 2013

 WALIKOTA DENPASAR, 


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA 

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 2

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 5 JUNI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINGKASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013

Nomor Urut	Uraian	Jumlah Belanja		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	1.278.760.312.587,10	1.278.760.312.587,10	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	513.061.591.494,85	513.061.591.494,85	-	-
4.1.1.	Pajak Daerah	403.000.000.000,00	403.000.000.000,00	-	-
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	38.079.489.000,00	38.079.489.000,00	-	-
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.325.102.494,85	15.325.102.494,85	-	-
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	56.657.000.000,00	56.657.000.000,00	-	-
4.2.	DANA PERIMBANGAN	656.582.041.300,20	656.582.041.300,20	-	-
4.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	64.982.449.300,20	64.982.449.300,20	-	-
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	580.807.702.000,00	580.807.702.000,00	-	-
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	10.791.890.000,00	10.791.890.000,00	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	109.116.679.792,05	109.116.679.792,05	-	-
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.688.512.000,00	1.688.512.000,00	-	-
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.529.182.792,05	100.529.182.792,05	-	-
4.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.898.985.000,00	6.898.985.000,00	-	-
4.9	JUMLAH	1.278.760.312.587,10	1.278.760.312.587,10	-	-
5.	BELANJA DAERAH	1.353.987.822.716,89	1.353.987.822.716,89	-	-
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	661.132.514.505,00	660.739.514.505,00	(393.000.000,00)	(0,06)
5.1.1.	Belanja Pegawai	579.045.202.745,00	579.045.202.745,00	-	-
5.1.4.	Belanja Hibah	26.665.000.000,00	26.665.000.000,00	-	-
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	162.500.000,00	162.500.000,00	-	-
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa	19.187.618.085,00	19.187.618.085,00	-	-
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	35.072.193.675,00	35.072.193.675,00	-	-
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	607.000.000,00	(393.000.000,00)	(39,30)
5.2.	BELANJA LANGSUNG	692.855.308.211,89	693.248.308.211,89	393.000.000,00	0,06
5.2.1.	Belanja Pegawai	54.688.927.423,00	54.246.127.423,00	(442.800.000,00)	(0,81)
5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	388.529.058.597,03	398.057.058.597,03	9.528.000.000,00	2,45
5.2.3.	Belanja Modal	249.637.322.191,86	240.945.122.191,86	(8.692.200.000,00)	(3,48)
5.8	JUMLAH BELANJA	1.353.987.822.716,89	1.353.987.822.716,89	-	-
5.9	SURPLUS/(DEFISIT)	(75.227.510.129,79)	(75.227.510.129,79)	-	-
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	75.227.510.129,79	75.227.510.129,79	-	-
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	89.979.712.831,79	89.979.712.831,79	-	-
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	89.979.712.831,79	89.979.712.831,79	-	-
6.19	JUMLAH	89.979.712.831,79	89.979.712.831,79	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	14.752.202.702,00	14.752.202.702,00	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	14.752.202.702,00	14.752.202.702,00	-	-
6.29	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.752.202.702,00	14.752.202.702,00	-	-
6.299	PEMBIAYAAN NETO	75.227.510.129,79	75.227.510.129,79	-	-
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	-	-

WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINGKASAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2013

KODE	URAIAN	PENDAPATAN				BELANJA				Bertambah/Berkurang Rp.	%				
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Bertambah/Berkurang Rp.	%	Tidak Langsung	Sebelum Pergeseran Langsung	Jumlah Belanja	Tidak Langsung			Setelah Pergeseran Langsung	Jumlah Belanja		
1.	URUSAN WAJIB	1.278.425.312.587,10	1.278.425.312.587,10	-	-	642.575.358.005,00	677.157.413.661,89	1.319.733.171.666,89	642.575.358.005,00	677.157.413.661,89	1.319.733.171.666,89	349.790.569.015,12	349.790.569.015,12	-	-
1.01.	PENDIDIKAN	-	-	-	-	284.383.195.400,00	65.407.373.615,12	349.790.569.015,12	284.383.195.400,00	65.407.373.615,12	349.790.569.015,12	349.790.569.015,12	349.790.569.015,12	-	-
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARHAGA	-	-	-	-	284.383.195.400,00	65.407.373.615,12	349.790.569.015,12	284.383.195.400,00	65.407.373.615,12	349.790.569.015,12	349.790.569.015,12	349.790.569.015,12	-	-
1.02.	KESERHATAN	51.000.000.000,00	51.000.000.000,00	-	-	87.051.727.240,00	89.873.437.030,00	176.925.164.270,00	87.051.727.240,00	89.873.437.030,00	176.925.164.270,00	80.417.158.070,00	96.508.006.200,00	-	-
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-	-	36.981.104.140,00	43.436.053.930,00	80.417.158.070,00	36.981.104.140,00	43.436.053.930,00	80.417.158.070,00	80.417.158.070,00	80.417.158.070,00	-	-
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	-	50.070.623.100,00	46.437.383.100,00	96.508.006.200,00	50.070.623.100,00	46.437.383.100,00	96.508.006.200,00	96.508.006.200,00	96.508.006.200,00	-	-
1.03.	PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	15.058.752.100,00	138.701.199.699,34	154.152.951.799,34	15.058.752.100,00	138.701.199.699,34	154.152.951.799,34	136.585.784.544,34	393.000.000,00	0,26	
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	-	-	-	-	9.273.010.900,00	126.919.773.644,34	136.192.784.544,34	9.273.010.900,00	127.312.773.644,34	136.585.784.544,34	136.585.784.544,34	393.000.000,00	0,29	
1.05.	PENATAAN RUANG	-	-	-	-	4.841.818.500,00	76.969.504.275,37	81.811.322.775,37	4.841.818.500,00	76.969.504.275,37	81.811.322.775,37	81.811.322.775,37	-	-	
1.05.01.	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	-	-	-	-	4.841.818.500,00	76.969.504.275,37	81.811.322.775,37	4.841.818.500,00	76.969.504.275,37	81.811.322.775,37	81.811.322.775,37	-	-	
1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	3.867.587.800,00	7.743.094.350,00	11.610.682.150,00	3.867.587.800,00	7.664.818.350,00	11.532.406.150,00	11.532.406.150,00	(78.276.000,00)	(0,67)	
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-	3.867.587.800,00	7.743.094.350,00	11.610.682.150,00	3.867.587.800,00	7.664.818.350,00	11.532.406.150,00	11.532.406.150,00	(78.276.000,00)	(0,67)	
1.08.	UNGKUNGAN HIDUP	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	15.100.693.100,00	102.449.895.408,86	117.550.588.508,86	15.100.693.100,00	102.449.895.408,86	117.550.588.508,86	108.869.138.588,86	-	-	
1.08.02.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-	-	11.703.913.400,00	97.165.225.188,86	108.869.138.588,86	11.703.913.400,00	97.165.225.188,86	108.869.138.588,86	108.869.138.588,86	-	-	
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN	1.208.548.623.587,10	1.208.548.623.587,10	-	-	178.464.414.160,00	111.253.105.166,15	289.717.519.326,15	178.071.414.160,00	111.331.381.166,15	289.407.795.326,15	(314.724.000,00)	(0,11)		
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	784.280.823.587,10	784.280.823.587,10	-	-	99.523.612.860,00	47.396.624.239,66	146.920.237.099,66	99.130.612.860,00	47.474.900.239,66	146.605.513.099,66	(314.724.000,00)	(0,21)		
2.	URUSAN PILIHAN	335.000.000,00	335.000.000,00	-	-	18.557.156.500,00	15.697.494.550,00	34.254.651.050,00	18.557.156.500,00	15.697.494.550,00	34.254.651.050,00	-	-		
2.07.	INDUSTRI	-	-	-	-	3.619.496.300,00	4.753.627.425,00	8.373.123.725,00	3.619.496.300,00	4.753.627.425,00	8.373.123.725,00	-	-		
2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERIDAGANGAN	-	-	-	-	3.619.496.300,00	4.753.627.425,00	8.373.123.725,00	3.619.496.300,00	4.753.627.425,00	8.373.123.725,00	-	-		
	Jumlah	1.278.760.312.587,10	1.278.760.312.587,10	-	-	661.132.514.505,00	692.855.308.211,89	1.353.987.822.716,89	660.739.514.505,00	693.248.308.211,89	1.353.987.822.716,89	-	-		

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWUJAYA MAUTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 5 JUNI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
RINCIAN PERGESERAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI SKPD,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Belanja		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%	Dasar Hukum
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.01.00.00.5. 1.01.1.01.01.00.00.5.2. 1.01.1.01.01.16.	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	349.790.569.015,12 65.407.373.615,12 33.739.136.052,00	349.790.569.015,12 65.407.373.615,12 33.739.136.052,00	- - -	- - -	- - -
1.01.1.01.01.16.88. 1.01.1.01.01.16.88.5.2.1. 1.01.1.01.01.16.88.5.2.2. 1.01.1.01.01.17. 1.01.1.01.01.17.03. 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1. 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2. 1.01.1.01.01.17.03.5.2.3.	UJIAN SD/MI Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal	1.090.037.000,00 900.000.000,00 190.037.000,00 8.862.352.250,00 1.756.162.700,00 2.100.000,00 104.062.700,00 1.650.000.000,00	1.090.037.000,00 457.200.000,00 632.837.000,00 8.862.352.250,00 1.756.162.700,00 2.100.000,00 5.062.700,00 1.749.000.000,00	- (442.800.000,00) 442.800.000,00 - - - - (99.000.000,00) 99.000.000,00	- (49,20) 233,01 - - - - (95,13) 6,00	- Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,- - - - - - Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,- -
1.02.1.02.01.00.00.5. 1.02.1.02.01.00.00.5.2. 1.02.1.02.01.16. 1.02.1.02.01.16.09. 1.02.1.02.01.16.09.5.2.1. 1.02.1.02.01.16.09.5.2.2.	DINAS KESEHATAN BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WANGAYA BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT Belanja Barang Dan Jasa	80.417.158.070,00 43.436.053.930,00 21.689.006.137,00 15.854.486.200,00 22.400.000,00 15.832.086.200,00 96.508.006.200,00 46.437.383.100,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00	80.417.158.070,00 43.436.053.930,00 21.689.006.137,00 15.854.486.200,00 22.400.000,00 15.832.086.200,00 96.508.006.200,00 46.437.383.100,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Belanja		Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%	Dasar Hukum
		Sebelum Pengeseran	Setelah Pengeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.	DINAS PEKERJAAN UMUM	136.192.784.544,34	136.585.784.544,34	393.000.000,00	0,29	
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA DAERAH	126.919.773.644,34	127.312.773.644,34	393.000.000,00	0,31	
1.03.1.03.01.16.	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG	14.541.190.400,00	14.739.190.400,00	198.000.000,00	1,36	
1.03.1.03.01.16.03.	PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE / GORONG-GORONG	9.383.000.000,00	9.581.000.000,00	198.000.000,00	2,11	
1.03.1.03.01.16.03.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.03.1.03.01.16.03.5.2.3.	Belanja Modal	9.383.000.000,00	9.383.000.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	13.296.120.000,00	13.296.120.000,00	195.000.000,00	1,47	
1.03.1.03.01.32.05.	PENATAAN PURA PENGUBENGAN PEKIDEH PURA AGUNG BESAKIH	2.402.870.000,00	2.402.870.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.32.05.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.870.000,00	2.402.870.000,00	2.395.000.000,00	30,432,02	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.03.1.03.01.32.05.5.2.3.	Belanja Modal	2.395.000.000,00	-	(2.395.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.32.14.	PENYIAPAN VENEU PORPROV	9.995.500.000,00	9.995.500.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.32.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.32.14.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.200.000,00	6.143.700.000,00	6.135.500.000,00	74,823,17	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.03.1.03.01.32.14.5.2.3.	Belanja Modal	9.985.500.000,00	3.850.000.000,00	(6.135.500.000,00)	(61,44)	
1.03.1.03.01.32.15.	PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR	644.350.000,00	644.350.000,00	-	-	
1.03.1.03.01.32.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.350.000,00	644.350.000,00	636.000.000,00	7,616,77	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.03.1.03.01.32.15.5.2.3.	Belanja Modal	636.000.000,00	-	(636.000.000,00)	(100,00)	
1.03.1.03.01.32.24.	PENATAAN PURA TIRTA HENING DESA PEKRAMAN DENPASAR	99.050.000,00	294.050.000,00	195.000.000,00	196,87	
1.03.1.03.01.32.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	99.050.000,00	294.050.000,00	195.000.000,00	196,87	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.05.1.05.01.00.00.5.	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	81.811.322.775,37	81.811.322.775,37	-	-	
1.05.1.05.01.00.00.5.2.	BELANJA DAERAH	76.969.504.275,37	76.969.504.275,37	-	-	
1.05.1.05.01.15.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	5.008.463.500,00	5.008.463.500,00	-	-	
1.05.1.05.01.15.18.	PENATAAN KAWASAN PERSIMPANGAN DAN PERBATASAN	924.475.000,00	924.475.000,00	-	-	
1.05.1.05.01.15.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.475.000,00	524.475.000,00	500.000.000,00	2.042,90	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.05.1.05.01.15.18.5.2.3.	Belanja Modal	900.000.000,00	400.000.000,00	(500.000.000,00)	(55,56)	
1.05.1.05.01.16.	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	54.961.628.925,00	54.961.628.925,00	-	-	
1.05.1.05.01.16.30.	RENOVASI / REHAB LAPANGAN TEMBAK	1.027.565.000,00	1.027.565.000,00	-	-	
1.05.1.05.01.16.30.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.027.565.000,00	22.565.000,00	(1.005.000.000,00)	(97,80)	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.05.1.05.01.16.30.5.2.3.	Belanja Modal	0,00	1.005.000.000,00	1.005.000.000,00	100,00	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.05.1.05.01.16.42.	PEMBANGUNAN PURA LUMINTANG DI DENPASAR	3.087.768.750,00	3.087.768.750,00	-	-	
1.05.1.05.01.16.42.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	15.768.750,00	52.758.750,00	36.990.000,00	234,58	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.05.1.05.01.16.42.5.2.3.	Belanja Modal	3.072.000.000,00	3.035.010.000,00	(36.990.000,00)	(1,20)	
1.05.1.05.01.16.51.	PEMBANGUNAN BANGUNAN BALE GONG PURA AYUN PENATIH DENPASAR	104.306.500,00	104.306.500,00	-	-	
1.05.1.05.01.16.51.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	4.306.500,00	104.306.500,00	100.000.000,00	2.322,07	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-
1.05.1.05.01.16.51.5.2.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)	(100,00)	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Belanja			Bertambah/ (Berkurang) (Rp.)	%	Dasar Hukum
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1	2	3	4	5	6	7	
1.06.1.06.01.00.00.5. 1.06.1.06.01.00.00.5.2. 1.06.1.06.01.21. 1.06.1.06.01.21.11. 1.06.1.06.01.21.11.5.2.2.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH Belanja Barang Dan Jasa	11.610.682.150,00 7.743.094.350,00 646.689.600,00 78.276.000,00 78.276.000,00	11.532.406.150,00 7.664.818.350,00 646.689.600,00 0,00 -	(78.276.000,00) (78.276.000,00) (78.276.000,00) (78.276.000,00) (78.276.000,00)	(0,67) (1,01) (12,10) (100,00)	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-	
1.08.1.08.02.00.00.5. 1.08.1.08.02.00.00.5.2. 1.08.1.08.02.15. 1.08.1.08.02.15.02. 1.08.1.08.02.15.02.5.2.2. 1.08.1.08.02.15.02.5.2.3.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal	108.869.138.588,86 97.165.225.188,86 46.953.589.440,00 18.545.675.000,00 45.675.000,00 18.500.000.000,00	108.869.138.588,86 97.165.225.188,86 46.953.589.440,00 18.545.675.000,00 45.675.000,00 18.500.000.000,00	- - - - - -	- - - - - -	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-	
1.20.1.20.03.00.00.5. 1.20.1.20.03.00.00.5.1. 1.20.1.20.03.00.00.5.1.8. 1.20.1.20.03.00.00.5.2. 1.20.1.20.03.02.	SEKRETARIAT DAERAH BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH PEMBENTUKAN ULP E-PROCUREMENT Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal	146.920.237.099,66 99.523.612.860,00 1.000.000.000,00 47.396.624.239,66 7.150.518.400,00	146.920.237.099,66 99.130.612.860,00 607.000.000,00 47.474.900.239,66 7.150.518.400,00	(314.724.000,00) (393.000.000,00) (393.000.000,00) 78.276.000,00 -	(0,21) (0,39) (39,30) 0,17 -	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-	
1.20.1.20.03.02.65. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.1. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.3. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.1. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.1. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.2. 1.20.1.20.03.02.65.5.2.3.	BAGIAN PROGRAM PEMBANGUNAN PEMBENTUKAN ULP E-PROCUREMENT Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal BAGIANORGANISASI PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal	716.000.000,00 594.000.000,00 77.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00	(716.000.000,00) (594.000.000,00) (77.000.000,00) (45.000.000,00) 78.276.000,00 78.276.000,00 78.276.000,00 78.276.000,00	(100,00) (100,00) (100,00) (100,00) 100,00 100,00 100,00 100,00	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-	
1.06.1.06.01.21.11.5.2.2. 1.06.1.06.01.21.11.5.2.3.	Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal	0,00 0,00	68.276.000,00 10.000.000,00	68.276.000,00 10.000.000,00	100,00 100,00	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011,-	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Belanja		Bertambah/ (Berkurang)		%	Dasar Hukum
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	
2.07.2.07.01.00.00.5, 2.07.2.07.01.00.00.5.2, 2.06.2.07.01.18, 2.06.2.07.01.18.17, 2.06.2.07.01.18.17.5.2.2, 2.06.2.07.01.18.17.5.2.3.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BELANJA DAERAH BELANJA LANGSUNG PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI PEMBINAAN PENGELOLA USAHA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL Belanja Barang Dan Jasa Belanja Modal	8.373.123.725,00 4.753.627.425,00 1.556.382.000,00 739.735.000,00 427.735.000,00 312.000.000,00	8.373.123.725,00 4.753.627.425,00 1.556.382.000,00 739.735.000,00 452.735.000,00 287.000.000,00	- - - - 25.000.000,00 (25.000.000,00)	- - - - 5,84 (8,01)	Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011, -	

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Sebelum Pergerakan					Setelah Pergerakan					Rp.	%
		Regional		Jenis Belanja		Modal	Regional		Jenis Belanja		Modal		
		3	4	5	6-3+4+5		7	8	9	10-7+8-9			
1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	20.714.221.500,00	52.416.229.740,00	29.319.444.168,86	102.449.895.408,86	20.714.221.500,00	52.416.229.740,00	29.319.444.168,86	102.449.895.408,86	11-10-6	12		
1.08.02.	DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	20.584.521.500,00	47.534.659.520,00	29.046.044.168,86	97.165.225.188,86	20.584.521.500,00	47.534.659.520,00	29.046.044.168,86	97.165.225.188,86				
1.08.02.15.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	191.650.000,00	28.120.589.440,00	18.641.350.000,00	46.953.589.440,00	191.650.000,00	28.120.589.440,00	18.641.350.000,00	46.953.589.440,00				
1.08.02.15.02.	Pemediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	45.675.000,00	18.500.000.000,00	18.545.675.000,00	-	45.675.000,00	18.500.000.000,00	18.545.675.000,00				
1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWALAN, DAN PERSANDIAN	11.603.770.650,00	76.388.803.116,15	6.337.200.290,00	94.329.774.056,15	11.603.770.650,00	76.388.803.116,15	6.337.200.290,00	94.329.774.056,15				
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	1.575.164.000,00	28.509.673.229,66	2.573.900.000,00	32.658.737.229,66	1.575.164.000,00	28.487.383.229,66	2.596.190.000,00	32.658.737.229,66				
1.20.03.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintahan UUP E-Procurement	602.900.000,00	5.106.068.400,00	1.441.550.000,00	7.150.518.400,00	602.900.000,00	5.083.778.400,00	1.463.840.000,00	7.150.518.400,00				
1.20.03.02.65.	Pembentukan UUP E-Procurement	594.000.000,00	77.000.000,00	45.000.000,00	716.000.000,00	594.000.000,00	54.710.000,00	67.290.000,00	716.000.000,00				
2.06.	PERDAGANGAN	116.920.000,00	1.853.365.380,00	345.975.000,00	2.316.260.380,00	116.920.000,00	1.853.365.380,00	345.975.000,00	2.316.260.380,00				
2.07.01.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	116.920.000,00	1.853.365.380,00	345.975.000,00	2.316.260.380,00	116.920.000,00	1.853.365.380,00	345.975.000,00	2.316.260.380,00				
2.07.01.18.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	2.000.000,00	1.242.382.000,00	312.000.000,00	1.556.382.000,00	2.000.000,00	1.242.382.000,00	312.000.000,00	1.556.382.000,00				
2.07.01.18.17.	Pembinaan Pengada Usaha Pedagang Pasar Tradisional	-	427.735.000,00	312.000.000,00	739.735.000,00	-	427.735.000,00	287.000.000,00	739.735.000,00				
	Jumlah	54.688.927.423,00	388.529.058.597,03	249.637.322.191,86	692.855.308.211,89	54.246.127.423,00	398.057.058.597,03	240.945.122.191,86	693.248.308.211,89	393.000.000,00	0,05		

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWILAYA MANTRA



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
TANGGAL : 5 JUNI 2013
NOMOR : 2 TAHUN 2013
TENTANG : PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2013

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
REKAPITULASI PERGESERAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Tahun Anggaran 2013

Kode	Uratan	Sebelum Pergeseran				Sebelum Pergeseran				Bertambah/Berkurang Rp.	%
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah 5 = (3+4)	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah 8 = (6+7)	9 = (8+5)	10		
1	2	3	4	5 = (3+4)	6	7	8 = (6+7)	9 = (8+5)	10		
01.	Pelayanan Umum	188.845.976.160,00	112.879.401.738,23	301.725.377.898,23	188.452.976.160,00	112.879.401.738,23	301.332.377.898,23	(393.000.000,00)	(0,13)		
01.1.06.	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	3.867.587.800,00	7.882.416.850,00	11.750.004.650,00	3.867.587.800,00	7.882.416.850,00	11.750.004.650,00	-	-		
01.1.20.	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPENGAWAJAN, DAN PERSANDIAN	178.464.414.160,00	94.329.774.056,15	272.794.188.216,15	178.071.414.160,00	94.329.774.056,15	272.401.188.216,15	(393.000.000,00)	(0,14)		
01.1.24.	KEARSIPAN	3.185.681.700,00	2.818.634.232,08	6.004.315.932,08	3.185.681.700,00	2.818.634.232,08	6.004.315.932,08	-	-		
01.1.25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.328.292.500,00	7.848.576.600,00	11.176.869.100,00	3.328.292.500,00	7.848.576.600,00	11.176.869.100,00	-	-		
02.	Pertahanan	-	1.549.145.400,00	1.549.145.400,00	-	1.549.145.400,00	1.549.145.400,00	-	-		
02.1.09.	PERTANAHAN	-	1.549.145.400,00	1.549.145.400,00	-	1.549.145.400,00	1.549.145.400,00	-	-		
03.	Ketertiban dan ketertaman	12.667.410.900,00	8.965.305.901,00	21.632.716.801,00	12.667.410.900,00	8.965.305.901,00	21.632.716.801,00	-	-		
03.1.19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	12.667.410.900,00	8.965.305.901,00	21.632.716.801,00	12.667.410.900,00	8.965.305.901,00	21.632.716.801,00	-	-		
04.	Ekonomi	36.616.296.955,00	58.432.468.512,97	95.048.765.467,97	36.616.296.955,00	58.432.468.512,97	95.048.765.467,97	-	-		
04.1.07.	PERHUBUNGAN	11.366.682.355,00	33.108.188.972,00	44.474.871.327,00	11.366.682.355,00	33.108.188.972,00	44.474.871.327,00	-	-		
04.1.14.	KETENAGAKERJAAN	4.347.780.900,00	2.665.539.637,97	7.013.320.537,97	4.347.780.900,00	2.665.539.637,97	7.013.320.537,97	-	-		
04.1.15.	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	2.526.201.700,00	3.345.019.400,00	5.871.221.100,00	2.526.201.700,00	3.345.019.400,00	5.871.221.100,00	-	-		
04.1.16.	PENANAMAN MODAL	-	497.630.000,00	497.630.000,00	-	497.630.000,00	497.630.000,00	-	-		
04.1.22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.229.661.300,00	7.004.545.270,00	10.234.206.570,00	3.229.661.300,00	7.004.545.270,00	10.234.206.570,00	-	-		
04.2.01.	PERTANIAN	11.526.474.400,00	6.623.785.508,00	18.150.259.908,00	11.526.474.400,00	6.623.785.508,00	18.150.259.908,00	-	-		
04.2.05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	434.132.300,00	434.132.300,00	-	434.132.300,00	434.132.300,00	-	-		
04.2.06.	PERDAGANGAN	-	2.316.260.380,00	2.316.260.380,00	-	2.316.260.380,00	2.316.260.380,00	-	-		
04.2.07.	INDUSTRI	3.619.496.300,00	2.437.367.045,00	6.056.863.345,00	3.619.496.300,00	2.437.367.045,00	6.056.863.345,00	-	-		
05.	Lingkungan Hidup	19.942.511.600,00	176.266.170.084,23	196.208.681.684,23	19.942.511.600,00	176.266.170.084,23	196.208.681.684,23	-	-		
05.1.05.	PENANGANAN RUMAH	4.841.818.500,00	73.816.274.675,37	78.658.093.175,37	4.841.818.500,00	73.816.274.675,37	78.658.093.175,37	-	-		
05.1.08.	LINGKUNGAN HIDUP	15.100.693.100,00	102.449.895.408,86	117.550.588.508,86	15.100.693.100,00	102.449.895.408,86	117.550.588.508,86	-	-		
06.	Perumahan dan fasilitas umum	15.058.752.100,00	141.854.429.299,34	156.913.181.399,34	15.058.752.100,00	142.247.429.299,34	157.306.181.399,34	393.000.000,00	0,25		
06.1.03.	PERUMAHAN UMUM	15.058.752.100,00	127.297.481.399,34	142.356.233.499,34	15.058.752.100,00	127.690.481.399,34	142.749.233.499,34	393.000.000,00	0,28		
06.1.04.	PERUMAHAN	-	14.556.947.900,00	14.556.947.900,00	-	14.556.947.900,00	14.556.947.900,00	-	-		

Kode	Uraian	Sebelum Pergerakan				Sebelum Pergerakan				Bertambah/Berkurang	
		Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah 5 = (3+4)	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah 8 = (6+7)	Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8+5)	10		
07.	Kesehatan	92.379.417.840,00	93.590.354.894,00	185.969.772.734,00	92.379.417.840,00	93.590.354.894,00	185.969.772.734,00	-	-		
07.1.02.	KESEHATAN	87.051.727.240,00	89.957.677.030,00	177.009.404.270,00	87.051.727.240,00	89.957.677.030,00	177.009.404.270,00	-	-		
07.1.12.	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEHAT/TERA	5.327.690.600,00	3.632.677.864,00	8.960.368.464,00	5.327.690.600,00	3.632.677.864,00	8.960.368.464,00	-	-		
08.	Parwisata dan Budaya	5.860.931.500,00	22.702.038.217,00	28.562.969.717,00	5.860.931.500,00	22.702.038.217,00	28.562.969.717,00	-	-		
08.1.17.	KEBUDAYAAN	2.449.745.700,00	18.169.463.792,00	20.619.209.492,00	2.449.745.700,00	18.169.463.792,00	20.619.209.492,00	-	-		
08.2.04.	PARWISATA	3.411.185.800,00	4.532.574.425,00	7.943.760.225,00	3.411.185.800,00	4.532.574.425,00	7.943.760.225,00	-	-		
10.	Pendidikan	284.383.195.400,00	65.388.788.615,12	349.771.984.015,12	284.383.195.400,00	65.388.788.615,12	349.771.984.015,12	-	-		
10.1.01.	PENDIDIKAN	284.383.195.400,00	61.141.898.335,12	345.525.093.735,12	284.383.195.400,00	61.141.898.335,12	345.525.093.735,12	-	-		
10.1.18.	KEPERMUDAAN DAN OLIMPIADA	-	4.246.890.280,00	4.246.890.280,00	-	4.246.890.280,00	4.246.890.280,00	-	-		
11.	Perindungan Sosial	5.378.022.050,00	11.227.205.550,00	16.605.227.600,00	5.378.022.050,00	11.227.205.550,00	16.605.227.600,00	-	-		
11.1.10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	5.378.022.050,00	6.731.937.500,00	12.109.959.550,00	5.378.022.050,00	6.731.937.500,00	12.109.959.550,00	-	-		
11.1.11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	1.405.390.550,00	1.405.390.550,00	-	1.405.390.550,00	1.405.390.550,00	-	-		
11.1.13.	SOSIAL	-	3.089.877.500,00	3.089.877.500,00	-	3.089.877.500,00	3.089.877.500,00	-	-		
	Jumlah	661.132.514.505,00	692.855.308.211,89	1.353.987.822.716,89	660.739.514.505,00	693.248.308.211,89	1.353.987.822.716,89	-	-		

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA